

Guru honorer: Pilar pendidikan yang belum sepenuhnya dihargai

Nadilah Dwi Cahyani¹

Program Studi Kimia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nadilaho306@gmail.com

Kata Kunci:

Guru Honorer, Pendidikan,
Penghargaan,
Ketimpangan,
Kesejahteraan Guru

Keywords:

Honorary Teachers,
Education, Recognition,
Inequality, Teacher Welfare

ABSTRAK

Di balik kesuksesan siswa meraih berbagai prestasi, terdapat peran besar guru honorer yang dengan dedikasi tinggi membimbing dan mendidik mereka. Hingga tahun 2023, tercatat sekitar 731.524 guru honorer tersebar di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Guru honorer memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam mengisi kekurangan tenaga pendidik di wilayah-wilayah yang kekurangan guru tetap. Namun, di tengah peran strategis tersebut, para guru honorer masih menghadapi ketimpangan, terutama dalam hal penghargaan dan kesejahteraan. Minimnya pengakuan serta insentif yang tidak memadai dapat menimbulkan dampak negatif terhadap semangat, kinerja, dan kualitas pengajaran mereka. Kondisi ini berpotensi menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah maupun sektor swasta untuk meningkatkan penghargaan terhadap guru honorer. Penghargaan tersebut tidak hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga mencakup pengakuan profesi, kesempatan pengembangan karier, serta perlindungan hukum dan sosial. Peningkatan perhatian terhadap nasib guru honorer akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan nasional dan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih adil, profesional, dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Behind the success of students in achieving various accomplishments lies the dedication of honorary teachers who guide them with great commitment. As of 2023, there are approximately 731,524 honorary teachers spread across different educational levels in Indonesia. These teachers play a crucial role in the national education system, particularly by filling the gap in teaching staff in underserved and remote areas. However, despite their vital contributions, many honorary teachers face inequality, especially in terms of recognition and compensation. The lack of appreciation and inadequate incentives may negatively affect their motivation, performance, and the quality of education delivered. This situation poses a serious challenge to efforts aimed at improving the overall quality of education. Therefore, concrete actions are needed from both the government and the private sector to enhance the recognition and appreciation of honorary teachers. Such appreciation should not only be financial but also include professional acknowledgment, career development opportunities, and legal and social protection. Improving the status and welfare of honorary teachers will positively impact the national education system, creating a fairer, more professional, and sustainable educational environment.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Guru memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan generasi penerus. Namun, di balik kemajuan pendidikan di Indonesia, terdapat sebuah ironi yang masih menjadi perdebatan nasib guru honorer yang belum sepenuhnya dihargai. Meskipun mereka memiliki peran yang sama pentingnya dengan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi kesejahteraan dan pengakuan terhadap dedikasi mereka masih jauh dari kata layak. Rendahnya upah, ketidakpastian status kepegawaian, serta keterbatasan akses terhadap kesejahteraan menjadi masalah yang terus dihadapi para guru honorer.

Artikel ini akan membahas peran penting guru honorer dalam sistem pendidikan Indonesia, Ketimpangan dalam Penghargaan terhadap Guru Honorer, Dampak dari Kurangnya Penghargaan terhadap Guru Honorer, dan Upaya Meningkatkan Penghargaan terhadap Guru Honorer. Dengan memahami peran mereka secara lebih mendalam, diharapkan muncul kesadaran bahwa guru honorer bukan sekadar tenaga pengajar, tetapi juga pilar penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing.

Pembahasan

Guru honorer memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Di berbagai daerah, banyak guru honorer yang harus berjuang lebih keras dibandingkan guru berstatus ASN. Mereka mengisi kekurangan tenaga pengajar di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Mereka harus mengajar di sekolah dengan fasilitas terbatas, menghadapi kondisi sosial ekonomi siswa yang sulit, serta mengelola kelas dengan jumlah murid yang banyak. Menurut Mulyasa (2013), guru adalah komponen utama dalam pendidikan yang berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing bagi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, meskipun berstatus honorer, hal itu tidak menghilangkan semangat mereka untuk terus berkontribusi dalam dunia pendidikan.(Sari, n.d.)

Ketimpangan utama yang dihadapi oleh guru honorer adalah gaji yang jauh dari kata layak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (2017), gaji guru honorer sering kali berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Berbeda dengan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima gaji sesuai dengan standar pemerintah. Kondisi ini menyebabkan banyak guru honorer harus mencari pekerjaan tambahan demi mencukupi kebutuhan keluarganya, maka dapat mengurangi fokus dan kualitas pengajaran di kelas.

Selain masalah gaji, guru honorer juga menghadapi ketidakpastian status kepegawaian. Berbeda dengan guru ASN yang memiliki kepastian karier, guru honorer sering kali bekerja dalam kondisi kontrak sementara yang dapat diperpanjang atau dihentikan sewaktu-waktu tanpa jaminan. Ketidakpastian dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam mendidik siswa.

Guru honorer juga kerap mengalami keterbatasan dalam mengakses hak-hak tenaga kerja yang seharusnya mereka peroleh. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru seharusnya mendapatkan hak berupa gaji yang layak, tunjangan, jaminan kesehatan, dan perlindungan kerja. Namun hak - hak tersebut sering kali tidak diberikan kepada mereka. Hasil penelitian dari Sudirman (2018) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil guru honorer yang mendapatkan akses terhadap jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Minimnya akses terhadap hak-hak tersebut membuat kondisi kesejahteraan guru honorer semakin terpuruk.(Nugraha et al., 2022)

Untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang lebih adil. Menurut Napitupulu (2021), status PPPK merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah yang diharapkan dapat memberikan kepastian kerja, gaji yang layak, serta tunjangan yang memadai.

Peningkatan kesejahteraan guru honorer dapat dilakukan dengan menaikkan gaji hingga mencapai standar minimum serta memberikan tunjangan seperti insentif kinerja, tunjangan transportasi, dan tunjangan keluarga. Selain itu, mereka juga harus mendapatkan akses terhadap jaminan sosial, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keamanan finansial mereka.

Selain pemerintah, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam memberikan penghargaan kepada guru honorer. sektor swasta bisa membantu melalui beasiswa, pelatihan, dan bantuan finansial. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, kesejahteraan dan penghargaan terhadap guru honorer dapat semakin meningkat.

Kesimpulan dan Saran

Jelas bahwa guru honorer memiliki peran sangat penting untuk meningkatkan sistem pendidikan Indonesia, terutama di wilayah terpencil yang kekurangan tenaga pengajar. Meskipun kontribusi mereka begitu besar, kenyataannya guru honorer masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan kesejahteraan, status kepegawaian yang tidak pasti, hingga keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar tenaga kerja. Ketidakadilan ini tidak hanya merugikan mereka sendiri, tetapi juga berpotensi menghambat pendidikan di Indonesia . Oleh karena itu, upaya peningkatan penghargaan terhadap guru honorer tidak hanya bergantung pada satu pihak saja yaitu pemerintah bisa jadi dari sektor swasta. Kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta inilah yang akan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya adil dan layak bagi guru honorer, tetapi juga berdampak positif bagi masa depan generasi bangsa.

Daftar Pustaka

- Nugraha, A. R., Setianingsih, E., Putri, F. W., Jaelani, R., & Vichaully, Y. (2022). *Problematika Guru Honorer dan Guru Nondik di Era Society 5.0. 6.*
- Mulyasa, E. (2013). Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualitas Guru di Era Global. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suyanto. (2017). Problematika Guru Honorer di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan kebudayaan*, 22(3), 243-252.
- Sudirman. (2018). Kesejahteraan guru honorer dalam perspektif perlindungan sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19(2), 115–124.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (2005). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. Diakses dari: [<https://peraturan.bpk.go.id>] (<https://peraturan.bpk.go.id>)
- Napitupulu, E. L. (2021, 8 Oktober). Status PPPK bentuk penghargaan pemerintah bagi guru honorer. *Kompas.id*.
- BPJS Kesehatan. (n.d.). Hak dan kewajiban peserta JKN-KIS. Diakses dari <https://www.bpjs-kesehatan.go.id>
- Sari, N. (n.d.). *MENJADI GURU PROFESIONAL DI ERA GLOBALISASI*.